

BAB II

GAMBARAN UMUM

2. 1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

2.1.1 Keadaan Geografis

Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi dua puluh sembilan kabupaten dan enam kota madya, dari dua puluh sembilan kabupaten tersebut salah satunya adalah Kabupaten Wonogiri. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Wonogiri terdiri dari dua puluh lima (25) kecamatan diikuti dengan wilayah yang luas yakni luasnya sekitar 182.236 Ha. Secara geografis, Kabupaten Wonogiri terletak antara garis lintang selatan $7^{\circ} 32'$ - $8^{\circ} 15'$ dengan garis bujur timur $110^{\circ} 41'$ - $111^{\circ} 18'$. Kontur lahan yang tidak rata mengakibatkan adanya disparitas sumber daya alam dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kabupaten Wonogiri juga memiliki batas wilayah, batas wilayah Kabupaten Wonogiri meliputi:

- a. Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar di bagian utara;
- b. Samudera Hindia dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) di bagian selatan;
- c. Kabupaten Klaten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian barat, dan;
- d. Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Karanganyar di bagian Timur.

Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan diikuti dengan 294 Desa/Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri berada di Kecamatan Wonogiri. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari pusat kabupaten adalah Kecamatan Paranggupito dengan jarak 68km dan kecamatan yang memiliki jarak terdekat dari pusat kabupaten adalah Kecamatan Selogiri. Sedangkan untuk kecamatan yang luas wilayahnya terkecil di Kabupaten Wonogiri adalah Kecamatan Puhpelem seluas 3.161,54 ha dan

Kecamatan Pracimantoro adalah kecamatan yang paling luas yakni 14.214,32 ha.

Berikut adalah pembagian wilayah di Kabupaten Wonogiri :

Tabel 1 Pembagian Wilayah Kabupaten Wonogiri

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Pracimantoro	17	1
2	Paranggupito	8	0
3	Giritontro	5	2
4	Giriwoyo	14	2
5	Batuwarno	7	1
6	Karangtengah	5	0
7	Tirtomoyo	12	2
8	Nguntoronadi	9	2
9	Baturetno	13	0
10	Eromoko	13	2
11	Wuryantoro	6	2
12	Manyaran	5	2
13	Selogiri	10	1
14	Wonogiri	9	6
15	Ngadirojo	9	2
16	Sidoharjo	10	2
17	Jatiroto	13	2
18	Kismantoro	8	2
19	Purwantoro	13	2
20	Bulukerto	9	1
21	Puhpelem	5	1
22	Slogohimo	15	2
23	Jatisrono	15	2
24	Jatipurno	9	2
25	Girimarto	12	2
Jumlah		251	43

Sumber : <http://si.disperakim.jatengprov.go.id/>

Kondisi permukaan wilayah Kabupaten Wonogiri mayoritas adalah perbukitan, Kabupaten Wonogiri memiliki 4 wilayah permukaan wilayah yaitu:

1. Wilayah dengan permukaan wilayah datar memiliki luas sekitar 432 hektar yang mayoritas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Hulu.

2. Wilayah yang permukaan wilayahnya bergelombang memiliki luas wilayah sekitar 7.865 hektar yang berada di hampir seluruh Kabupaten Wonogiri.
3. Wilayah dengan permukaan wilayah curam memiliki luas 237 hektar, contoh wilayah yang terjal ini berada di kecamatan Giriwoyo dan Batuwarno,
4. Wilayah dengan permukaan wilayah yang sangat terjal memiliki luas 96 hektar.

Dengan adanya perbedaan permukaan wilayah wilayah seperti itu dan sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah yang bergelombang maka dalam penggunaan lahan pun beragam. Pada umumnya lahan di Kabupaten Wonogiri digunakan sebagai lahan tegalan dengan prosentase sekitar 48%, kemudian diikuti lahan pertanian sebesar 20%, lahan sawah sekitar 17%, Hutan Negara sebesar 9%, Hutan Rakyat 2%, dan lain-lain sekitar 0,56%. Lahan yang digunakan sebagai tegalan biasanya ditanami dengan jenis tanaman umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, jagung, kedelai, dan padi. Sedangkan untuk persawahan biasanya dapat ditemukan di daerah dataran banjir, dataran alluvial serta kaki perbukitan. Di hutan rakyat biasa menjumpai tumbuhan seperti pinus, jati, sono, keling dan mahoni. Sedangkan untuk daerah non pertanian biasanya digunakan sebagai pelataran atau kapling dan untuk bangunan. Sebagai suatu daerah pemerintahan, Kabupaten Wonogiri memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang terwujud dalam sebuah Visi yaitu :

“Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Demokratis”.

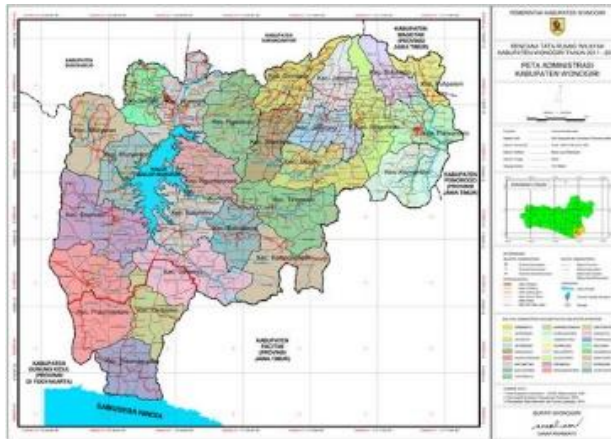
Guna mewujudkan visi dari RPJMD tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki 7 misi, yaitu :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis terpercaya yang meliputi unsur manajemen keuangan, manajemen pelayanan, dan manajemen hukum dan pengawasan

dengan semboyan Sukses sebagai pra managerial yang memiliki makna sebagaimana penjelasan singkat dalam visi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Wonogiri melalui berbagai upaya dalam segala aspek kehidupan, seperti upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan melalui kebijakan Wonogiri Pintar, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, peningkatan kualitas kesehatan melalui pengadaan kebijakan Wonogiri Sehat, dan kebijakan Wonogiri Beriman yang diselenggarakan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dengan menjunjung tinggi sikap toleransi antarumat.
3. Membangun dan memberdayakan masyarakat Wonogiri dari pinggiran dengan memperkuat prioritas pembangunan di desa.
4. Meningkatkan produktifitas masyarakat Kabupaten Wonogiri dan daya saing di segala bidang sehingga Wonogiri dapat maju dan bangkit bersama dengan daerah lain.
5. Mengembangkan dan melestarikan adat, budaya serta tradisi di yang hidup masyarakat Wonogiri.
6. Pemerataan pembangunan dengan prinsip keadilan di segala bidang.
7. Mengembangkan seluruh potensi-potensi di dalam jiwa dan raganya Kabupate Wonogiri untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Wonogiri.

Gambar 1 Kondisi Geografis Kabupaten Wonogiri



Sumber : <http://si.disperakim.jatengprov.go.id/>

Berdasarkan rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Wonogiri beberapa permasalahan terkait dengan kesehatan salah satunya adalah keterbatasan pelayanan kesehatan terutama di daerah pedesaan dan perbatasan.

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

2.1.2.1 Kondisi Demografis

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, modal atau aset terpenting dalam melaksanakan pembangunan adalah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang memadai dan memiliki kualitas yang mumpuni, pembangunan daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Wonogiri mencapai 1.091.504 jiwa yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 545.595 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 545.909 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan dengan kepadatan penduduk sebagai berikut :

Tabel 2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019

KECAMATAN	Kepadatan Penduduk (Jiwa)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pracimantoro	428	430	432	434	436
Paranggupito	259	259	260	260	260
Giritontro	317	318	318	318	319
Giriwoyo	362	362	363	363	363
Batuwarno	332	332	333	333	333
Karangtengah	273	275	277	279	281
Tirtomoyo	533	534	535	537	538
Nguntoronadi	286	286	286	287	287
Baturetno	508	509	510	512	513
Eromoko	342	343	343	344	344
Wuryantoro	357	358	359	359	360
Manyaran	426	428	429	431	433
Selogiri	764	765	766	767	768
Wonogiri	966	972	978	983	988
Ngadirojo	574	575	576	576	577
Sidoharjo	723	729	735	741	747
Jatiroto	575	576	577	577	578
Kismantoro	515	516	517	517	518
Purwantoro	818	819	820	821	822
Bulukerto	722	723	724	725	725
Puhpelem	615	617	619	621	623
Slogohimo	718	720	722	724	726
Jatisrono	1148	1152	1156	1159	1162
Jatipurno	561	562	563	563	564
Girimarto	612	613	614	615	615

Sumber : <https://wonogirikab.bps.go.id/>

Sedangkan total penduduk Wonogiri yang didasarkan pada jenis kelamin dan kelompok umur adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Penduduk Wonogiri Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Struktur Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	%
1	75+	25.542	31.664	57.206	5,24
2	70-74	16.088	18.846	34.934	3,20
3	65-69	26.092	24.887	50.979	4,67
4	60-64	31.052	33.044	64.096	5,87
5	55-59	35.449	39.016	74.465	6,82
6	50-54	39.447	42.030	81.477	7,46
7	45-49	38.110	39.501	77.611	7,11
8	40-44	37.164	36.398	73.562	6,74
9	35-39	38.782	37.985	76.767	7,03
10	30-34	34.180	33.048	67.228	6,16
11	25-29	38.175	35.555	73.730	6,75
12	20-24	41.018	37.882	78.900	7,23
13	15-19	41.209	38.630	79.839	7,31
13	15-19	41.209	38.630	79.839	7,31
14	10-14	37.140	35.134	72.274	6,62
15	5-9	35.266	33.562	68.828	6,31
16	0-4	30.881	28.727	59.608	5,46
Jumlah		545.595	545.909	1.091.504	100

Sumber : LKPJ Bupati tahun 2019

Dari data diatas diketahui bahwa penduduk yang termasuk kelompok usia muda yakni umur 0-14 tahun yang dianggap sebagai penduduk belum dapat menghasilkan pendapatan karena belum memiliki pekerjaan sebanyak 200.710 orang hal ini dikarenakan mereka masih bergantung pada orang tua atau orang lain guna menanggung keberlangsungan hidupnya. Penduduk sebagai penduduk yang sudah memasuki umur produktif yakni umur 15-64 tahun sebanyak 747.675 hal ini dikarenakan penduduk umur produktif yang dianggap mampu dan memiliki penghasilan yang cukup, dan kelompok penduduk lanjut usia yakni umur 65 tahun keatas yang dianggap sebagai penduduk yang sudah tidak produktif lagi sebanyak 143.119 jiwa.

2.1.2.2 Pendidikan

Guna melihat dan mengukur indeks pembangunan masyarakat di sebuah daerah dapat ditinjau dari tingkat pendidikannya. Setiap manusia yang hidup dunia berhak untuk mendapatkan dan mengenyam pendidikan. Dengan pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga pendidikan adalah wadah yang wajib diberikan dan disediakan oleh negara. Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Wonogiri yang berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih optimal.

Komitmen pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam memberikan pelayanan pendidikan yang optimal dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan baru seperti pemberian beasiswa bagi pelajar di Kabupaten Wonogiri yang menempuh pendidikan lanjutan di universitas negeri maupun universitas swasta dengan akreditasi A, selain itu juga terdapat kebijakan sekolah gratis yang ditujukan bagi siswa sekolah.

**Tabel 4 Data Penduduk Berdasarkan Tamatan Pendidikan
Tahun 2018 dan Tahun 2019**

No	Tingkat Pendidikan	Penduduk Tahun 2018		Penduduk Tahun 2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	191.153	17,60	196.456	18,00
2	Belum Tamat SD/Sederajat	139.959	12,89	136.765	12,53
3	Tamat SD/MI/Sederajat	370.679	34,13	367.340	33,65
4	Tamat SMP/MTs/Sederajat	194.850	17,94	196.130	17,97
5	Tamat SLTA/Sederajat	154.950	14,27	158.895	14,56
6	Tamat D1/D2	4.753	0,44	4.713	0,43

No	Tingkat Pendidikan	Penduduk Tahun 2018		Penduduk Tahun 2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%
7	Tamat D3	8.210	0,76	8.362	0,77
8	Tamat D4/S1	20.476	1,81	21.614	1,98
9	Tamat S2	1.130	0,10	1.189	0,11
10	Tamat S3	37	0	40	0
Jumlah :		1.086.197	100,00%	1.091.504	100,00%

Sumber : LKPJ Bupati Wonogiri Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan di Kabupaten Wonogiri mengalami perubahan, dimana jumlah masyarakat Kabupaten Wonogiri yang tamat sekolah dasar mengalami penurunan sebanyak 3.339 jiwa. Sedangkan masyarakat yang memiliki ijazah sekolah menengah pertama mengalami peningkatan sebanyak 1.278 jiwa, dan masyarakat yang memiliki ijazah sekolah menengah atas juga mengalami peningkatan sebanyak 3.945 jiwa. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Wonogiri sudah paham dan sadar akan pentingnya pendidikan sudah mengalami kemajuan.

2.1.2.3 Kesehatan

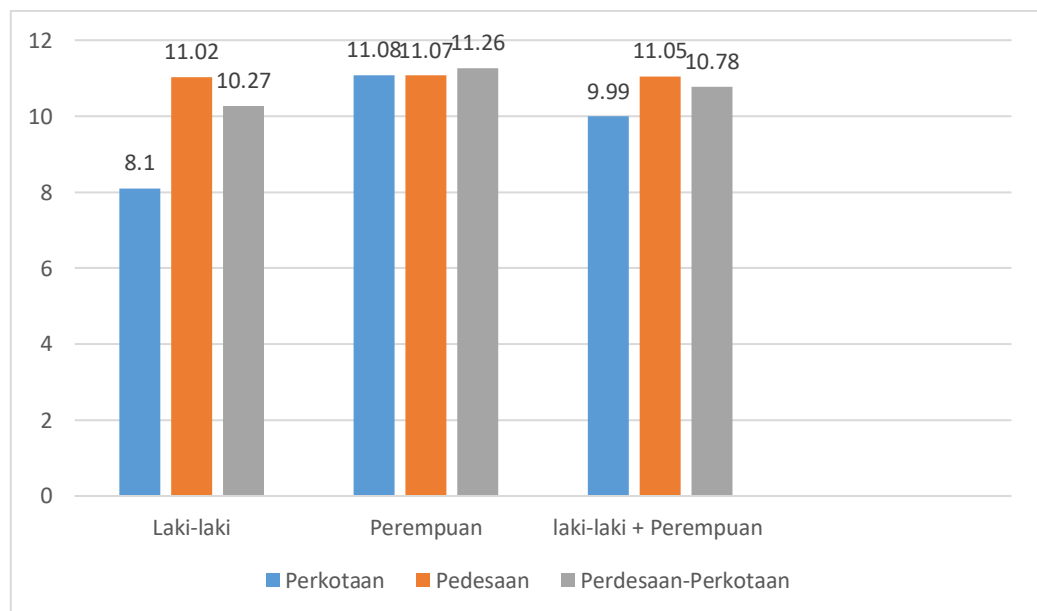
Peningkatan dari kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu misi pemerintah Kabupaten Wonogiri, maka dari itu pemerintah Kabupaten Wonogiri mengeluarkan berbagai macam kebijakan salah satunya adalah Wonogiri Sehat. Seperti yang diagendakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2016-2021, kesehatan termasuk ke dalam tema pembangunan tahun ke dua dan tahun ke lima. Kondisi kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari jumlah atau prosentase keluhan kesehatan yang diterima pemerintah daerah dalam satu bulan terakhir. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 menunjukkan bahwa prosentase masyarakat Kabupaten Wonogiri yang memiliki keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir sebesar 26,30%. Di Kabupaten

Wonogiri keluhan kesehatan yang lebih tinggi dialami oleh penduduk perempuan dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

2. 1Profil Kesehatan Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Wonogiri tahun 2018, angka kesakitan mencapai 10,78% yang berarti 11 dari 100 orang di Kabupaten Wonogiri mengeluhkan sakit dalam satu bulan terakhir. Masyarakat yang berobat jalan atau berobat ke praktek dokter / bidan sebanyak 47,79%. Dalam 2 tahun terakhir sebanyak 77,04% ibu melahirkan di rumah sakit/rumah sakit bersalin/klinik dan sebanyak 88,91% bayi lahir dengan BB lebih dari 2,5 Kg. Selain itu, jumlah rumah yang memiliki akses air bersih sebanyak 83,16%, dan jumlah masyarakat yang tinggal di daerah kumuh sebanyak 0,96%.

Gambar 2 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Kabupaten Wonogiri Tahun 2018



Sumber: wonogirikab.bps.go.id/publikasi

Berdasarkan dari hasil Survei Nasional yang dilakukan pada 2018 diatas, di Kabupaten Wonogiri angka kesakitan perempuan lebih tinggi yaitu sebesar 11,26% dibandingkan laki-laki yang sebesar 10,27%. Pada tahun 2019 angka kesakitan perempuan mengalami penurunan yakni pada angka 10,81% dan angka

kesakitan laki – laki mengalami peningkatan yakni pada angka 11,26%. Selain itu berdasarkan daerah tempat tinggalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan memiliki angka kesakitan lebih tinggi yaitu sebesar 11,05% dibandingkan masyarakat yang tinggal di perkotaan yang sebesar 9,99%. Sedangkan untuk bayi dan balita, di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019 bayi dan balita laki – laki yang memiliki kartu imunisasi mencapai 98,34% namun hanya 60,82% yang mendapatkan imunisasi lengkap. Untuk bayi dan balita perempuan yang memiliki kartu imunisasi mencapai angka 93,20%, namun hanya 53,23% yang mendapatkan imunisasi lengkap. Tentu hal ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri.

Selain dari angka keluhan kesehatan, kondisi kesehatan masyarakat suatu daerah juga dapat dilihat dari angka persebaran fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang ada. Sebagai penunjang kesehatan, sarana dan prasarana tentu sangat dibutuhkan, terlebih wilayah Kabupaten Wonogiri yang cukup luas sehingga membutuhkan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memadai.

Tabel 5 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Tahun 2014-2018

Kecamatan <i>Sub District</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>		Rumah Sakit Bersalin <i>Maternity Hospital</i>		Poliklinik <i>Polyclinic</i>		Puskesmas <i>Public Health Center</i>		Puskesmas Pembantu <i>Subsidiary of Public Health Center</i>		Apotek <i>Pharmacy</i>	
	14	18	14	18	14	18	14	18	14	18	14	18
Pracimantoro	1	1	2	1	5	-	3	3	9	10	1	1
Paranggupito	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	-	-
Giritontro	-	-	-	-	1	3	1	1	3	3	1	2
Giriwoyo	-	-	-	-	4	-	2	2	7	9	1	1
Batuwarno	-	-	-	-	1	1	1	1	5	5	-	1
Karantengah	-	-	-	-	1	-	1	1	5	4	-	-
Tirtomoyo	-	-	2	-	1	1	2	2	5	4	2	2
Nguntoronadi	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	2	2

Kecamatan <i>Sub District</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>		Rumah Sakit Bersalin <i>Maternity Hospital</i>		Poliklinik <i>Polyclinic</i>		Puskesmas <i>Public Health Center</i>		Puskesmas Pembantu <i>Subsidiary of Public Health Center</i>		Apotek <i>Pharmacy</i>	
Tahun / Year	14	18	14	18	14	18	14	18	14	18	14	18
Baturetno	1	1	2	-	4	3	3	3	2	2	2	3
Eromoko	1	1	2	-	2	1	2	1	8	6	1	3
Wuryantoro	-	1	-	-	3	-	1	1	3	3	2	3
Manyaran	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	2
Selogiri	2	2	3	-	4	3	1	2	4	4	3	3
Wonogiri	2	2	4	4	4	8	2	4	5	7	7	8
Ngadirojo	-	-	2	-	3	2	1	1	6	6	1	1
Sidoharjo	1	-	2	-	5	4	1	1	4	9	2	2
Jatiroto	-	1	1	-	1	4	1	1	11	11	1	1
Kismantoro	-	-	-	-	-	-	1	1	9	10	-	-
Purwantoro	1	-	1	-	3	6	3	2	5	6	1	2
Bulukerto	-	-	-	-	2	1	1	1	6	7	1	1
Puhpelem	-	1	-	-	1	-	1	1	5	5	1	2
Slogohimo	1	1	3	-	2	7	1	1	8	8	2	3
Jatisrono	1	1	4	-	7	6	3	3	8	5	5	5
Jatisrono	1	1	4	-	7	6	3	3	8	5	5	5
Jatipurno	-	-	-	-	1	2	1	2	3	4	1	1
Girimarto	-	-	-	-	3	3	1	1	8	9	-	1
Wonogiri	11	12	28	5	59	56	38	40	139	145	38	50

Sumber : wonogirikab.bps.go.id diunduh pada 2 Oktober 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah fasilitas kesehatan utamanya Puskesmas dan Puskemas pembantu sebagai faskes pertama mengalami peningkatan pada tahun 2018 yakni dengan total 195 unit. Selain fasilitas kesehatan, tenaga medis juga diperlukan, berikut adalah data tenaga kesehatan (tenakes) menurut kecamatan di Kabupaten Wonogiri :

Tabel 6Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri, 2018

Kecamatan Sub Districts	Dokter Doctor	Perawat Nurse	Bidan Midwife	Farmasi Pharmaceutical	Ahli Gizi Nutritionist
Pracimantoro	3	30	39	6	18
Paranggupito	-	8	8	-	7
Giritontro	1	5	7	1	8
Giriwoyo	2	13	17	1	10
Batuwarno	1	3	9	1	6
Karangtengah	1	5	7	1	4
Tirtomoyo	2	12	23	-	1
Nguntoronadi	2	11	18	2	9
Baturetno	4	20	23	4	7
Eromoko	1	21	18	2	2
Wuryantoro	1	11	18	2	6
Manyaran	1	9	9	1	3
Selogiri	1	12	16	2	7
Wonogiri	6	16	29	4	22
Ngadirojo	1	6	14	1	3
Sidoharjo	-	7	18	1	1
Jatiroto	-	10	17	1	7
Kismantoro	-	12	11	1	3
Purwantoro	2	25	28	3	8
Bulukerto	1	10	14	1	1
Puhpelem	1	10	7	1	2
Slogohimo	2	13	19	1	3
Jatisrono	4	25	27	1	3
Jatipurno	1	7	15	1	1
Girimarto	1	5	19	1	-
Wonogiri	39	306	430	40	142

Sumber : wonogirikab.bps.go.id di unduh pada 2 Oktober 2020

Data tersebut menjelaskan bahwa masih ada kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang belum memiliki dokter, yaitu Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Jatiroto, dan Kecamatan Kismantoro. Tenaga kesehatan paling banyak adalah bidan dengan jumlah 430 orang kemudian diikuti

oleh perawat sebanyak 306 orang. Sedangkan tenaga kesehatan paling sedikit adalah dokter dengan jumlah 39 orang.

2. 2 Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Kabupaten Wonogiri Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan.

Dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat 1, hierarki dari dan jenis peraturan perundang-undangan terdiri dari¹ :

1. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Tap/Ketetapan MPR RI ;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain tujuh peraturan diatas, terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, seperti Peraturan Bupati/Walikota. Peraturan Bupati/Walikota kemudian dimasukkan ke dalam jenis peraturan kepala daerah seperti yang tercantum pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Wonogiri mengeluarkan kebijakan pembebasan tarif retribusi di fasilitas kesehatan pertama bagi masyarakat Wonogiri, yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2018 tentang pembebasan tarif retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat bagi penduduk kabupaten wonogiri yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Peraturan bupati tersebut mengatur tentang :

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Jenis Layanan

Jenis-jenis pelayanan yang dibebaskan adalah pelayanan kesehatan yang menjadi objek retribusi di Puskesmas dan jaringannya.

2. Persyaratan Pembebasan Retribusi

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 persyaratan tersebut meliputi kartu identitas diri (e-KTP) atau Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau Kartu Identitas Anak (bagi anak usia 0-17 tahun), Surat Keterangan Lahir (bagi bayi yang belum memiliki akta kelahiran), dan surat Keterangan Tempat Tinggal yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah setempat (bagi orang dengan gangguan jiwa atau penduduk kabupaten yang sedang memproses pengurusan administrasi kependudukan).

3. Pengecualian Pembebasan Retribusi

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 5 pengecualian pembebasan retribusi meliputi pelayanan kesehatan atas perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan Perusahaan/Lembaga/Organisasi di wilayah Kabupaten Wonogiri yang memberikan fasilitas penjaminan pelayanan kesehatan bagi karyawan/pekerja, Pelayanan Kesehatan atas permintaan pihak ketiga dalam rangka kegiatan bakti sosial yang melibatkan Puskesmas, dan bagi masyarakat yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan dengan status tidak aktif.

4. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, maka pembiayaan akan dibebankan pada anggaran belanja daerah sebagaimana yang telah disetujui oleh DPRD..

2. 3 Pesebaran Penyakit Di Kabupaten Wonogiri

Dalam pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan penyelesaian terkait penyakit meliputi pemberian imunisasi, pengentasan penyakit menular dan tidak menular, serta surveilans epidemiologi. Penyakit menular di sini adalah penyakit menular langsung penyakit menular yang bersumber dari binatang serta penyakit menular yang yang dapat menjadi masalah kesehatan masyarakat.

Tabel 7Tabel Kasus Penyakit Yang Bersumber Dari Binatang Kabupaten Wonogiri Tahun 2017-2018

No.	Penyakit	Jumlah kasus	
		2017	2018
1.	Malaria	1	1
2.	Demam Berdarah Dengue	9	24

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Wonogiri 2018

Berdasarkan profil kesehatan kabupaten Wonogiri tahun 2018, terjadi 2 kasus penyakit yang bersumber dari binatang yakni penyakit malaria dan penyakit demam berdarah dengue. Penyakit tersebut merupakan penyakit yang banyak terjadi di daerah beriklim tropis maupun subtropis. Jumlah kasus penyakit malaria Kabupaten tahun 2017-2018 tercatat 2 kasus yakni di Kecamatan Manyaran. Penyakit demam berdarah pada tahun 2017 hingga 2018 terdapat 33 kasus dengan jumlah kematian 3 kasus, sedangkan jumlah kasus tertinggi di Kecamatan Slogohimo dengan 5 kasus. selain penyakit menular yang ditularkan oleh binatang terdapat juga penyakit menular yang ditularkan langsung dari manusia ke manusia lain. Penyakit ini cepat berkembang dan menyebar di masyarakat apabila tidak langsung cepat-cepat. menurut profil kesehatan Kabupaten Wonogiri 2018 terdapat beberapa penyakit menular langsung yang terjadi.

Tabel 8Tabel Kasus Penyakit Menular Langsung Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2018

No.	Penyakit	Jumlah Kasus		
		2016	2017	2018

1.	Tuberkulosis Paru	788	865	1.100
2.	Kusta	16	17	25
3.	Diare	8.237	7.639	10.576

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Wonogiri 2018

Pada tahun 2018 di Kabupaten Wonogiri telah terjadi 1.100 kasus penyakit Tuberkulosis, kasus terbanyak terjadi di Puskesmas Ngadirojo dengan total kasus 33 penderita, yang kemudian diikuti oleh Puskesmas Purwantoro I sebanyak 31 penderita, dan Puskesmas Baturetno I sebanyak 26 kasus. Tahun 2018 telah terjadi peningkatan jumlah penderita Tuberkulosis di Kabupaten Wonogiri dimana pada tahun 2016 tercatat 788 kasus dan pada tahun 2017 tercatat 865 kasus penyakit Tuberkulosis. Sedangkan untuk penyakit kusta yang merupakan salah satu penyakit menular langsung, di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018 tercatat 25 kasus, kasus terbanyak berada di Puskesmas Purwantoro I yakni dengan 4 penderita. Jumlah kasus penderita kusta pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2016 dengan 16 kasusnya dan 2017 dengan 17 kasus. Pada tahun yang sama yakni pada tahun 2018 di Kabupaten Wonogiri tercatat 10.576 kasus penyakit diare. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2017 tercatat sebanyak 7639 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 8237 kasus. Adanya peningkatan pada tahun 2018 ini dikarenakan masyarakat masih banyak yang enggan untuk melapor sehingga pemerintah daerah melalui Puskesmas di seluruh kecamatan di Wonogiri mengadakan kegiatan Gerakan Ketok Pintu atau GKP guna mendata masyarakat yang menderita atau mengalami gejala penyakit TBC dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Wonogiri terkait dengan bahaya penyakit TBC.

2.1.2.4 Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,09% dari tahun 2017, yakni mencapai 5,41%. Sektor yang mengalami peningkatan tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi, yang kemudian disusul oleh sektor transportasi dan perdagangan. Namun pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri masih diangka 10,75% dengan jumlah penduduk sebanyak 957 ribu jiwa. Hal ini tentu menjadi cacatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dengan

kontur wilayah yang bergelombang maka Kabupaten Wonogiri memiliki beberapa potensi unggulan. Potensi unggulan tersebut berupa :

1. Pertanian

Kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri cukup mendukung untuk pertanian hal ini dikarenakan beberapa wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan DAS Sungai Bengawan Solo dan beberapa sungai lain. Dengan jumlah debit air sungai yang ada maka dapat menjamin keberhasilan pertanian yang ada di Kabupaten Wonogiri.

2. Peternakan

Kabupaten Wonogiri juga cocok digunakan sebagai lahan ternak baik sapi, kambing, banteng, dan domba, serta unggas seperti ayam buras dan itik.

3. Perikanan

Di sektor perikanan meliputi budidaya dan perikanan tangkap seperti yang ada di Waduk Gajah Mungkur. Selain Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri memiliki daerah yang berdekatan dengan laut yakni di Wonogiri bagian selatan.

4. Perkebunan

Di sektor perkebunan, komoditas tanaman yang paling umum di Kabupaten Wonogiri adalah tanaman jambu mete, cengkeh dan janggolan.

5. Sumber Daya Mineral; dan

Beberapa kecamatan di Kabupaten Wonogiri adalah bagian dari deretan pegunungan karst yang meliputi, Karst Sewu yang terbentang melewati tiga Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, hingga Kabupaten Pacitan. Sedangkan untuk hasil galian logam dan non logam berupa emas, tembaga, mangan, galena, batu gamping, andesit, trass, pasir kuarsa, sirtu, bentonit, tanah liat, kaolin, damar, fosfat, batu ½ permata, oker, tuf, dasit, dan diorit. Hasil tambang unggulannya yaitu galena, kalsit, andesit, tras, batu gamping, tanah liat, dan batu pasir.

6. Pariwisata

Kabupaten Wonogiri juga memiliki potensi pariwisata yang telah dikelola untuk menambah pendapatan asli daerah. Pada tahun 2019 setidaknya Kabupaten Wonogiri telah memiliki sekitar 11 jenis obyek wisata. Jenis – jenis obyek wisata

tersebut meliputi gunung, goa, pantai, hutan, air terjun, peninggalan sejarah, destinasi agrowisata, wisata tirta, dan wisata pendidikan.

7. Industri

Kabupaten Wonogiri juga memiliki beberapa daerah yang digunakan sebagai daerah industri seperti industri pengolahan abon ikan nila di Kecamatan Wonogiri dan industri garmen di Kecamatan Selogiri.

2. 2 DPRD KABUPATEN WONOGIRI

DPRD adalah perwakilan rakyat yang menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dengan pemerintahan. Selain itu DPRD juga memiliki kewajiban untuk menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan, maka DPRD harus bisa menjaga dan memelihara keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan masyarakat yang diwakilinya dan kepentingan pemerintah.

Pada tahun 2019 lalu, telah dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif atau anggota DPRD periode 2019-2024. DPRD Kabupaten Wonogiri periode 2019-2024 diketuai oleh Bapak Setyo Sukarno yang selanjutnya dipimpin oleh Bapak Sriyono terdiri dari 49 orang anggota yang dibagi menjadi 6 fraksi, yaitu Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (Gabungan dari PAN dan PKB).² Berikut adalah daftar Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri 2019-2024:

Tabel 9 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Periode 2019-2024 :

No.	F r a k s i		
		2014	2019
1 .	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13	28
2 .	Partai Golongan Karya	10	8
3 .	Partai Keadilan Sejahtera	6	4
4 .	Partai Demokrat	4	-
5 .	Amanat Persatuan Indonesia	4	3

² <https://dprd.wonogirikab.go.id/index.php/fraksi>

6 .	Partai Persatuan Pembangunan	2	-
7 .	Partai Gerindra	4	4
8 .	Partai Nasional Demokrat	1	-
9 .	Partai Kebangkitan Bangsa	1	3
	Jumlah	45	50

Sumber : Diolah penulis dari kpud-wonogirikab.go.id diunduh pada 6 Oktober 2020

Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri tugas, fungsi dan wewenangnya sendiri, sehingga diperlukan alat kelengkapan lain untuk menunjang keberlangsungan kegiatan DPRD maka dari dibentuklah Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri. Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dipimpin oleh Bapak Ir. Gatot Siswoyo selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri. Guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari fungsi pengawasan, DPRD memerlukan alat kelengkapan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Alat kelengkapan ini terbagi menjadi 2 sifat yakni tetap dan tidak tetap, yang termasuk alat kelengkapan tetap ialah pimpinan DPRD hingga Badan Kehormatan, sedangkan yang termasuk alat kelengkapan tidak tetap ialah alat kelengkapan lain yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Wonogiri terdiri dari :³

1. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD ini terdiri dari 1 orang Ketua dan 3 orang Wakil Ketua DPRD. Pimpinan DPRD adalah salah satu dari alat kelengkapan DPRD, bersifat kolektif dan terdiri dari anggota – anggota yang telah dipilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua. Pimpinan DPRD memiliki tugas utama untuk memimpin pengorganisasian DPRD. Pimpinan DPRD terdiri dari unsur fraksi. Masa kerja Pimpinan DPRD adalah 5 tahun. ⁴

DPRD Kabupaten Wonogiri Periode 2019-2024 diketuai oleh Bapak Setyo Sukarno, dan didampingi oleh Bapak Sugeng Ahmady, Bapak Krisyanto, dan Ibu Siti Hardiyani. Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki tugas antara lain memimpin jalannya rapat DPRD dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil rapat, melakukan penyusunan renja pimpinan DPRD, dan mengadakan kegiatan

³ Peraturan DPRD Nomor 1 pasal 39 loc. cit

⁴ Bratakusumah, Deddy Supriady. *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin*. Gramedia Pustaka Utama, 2001. Hlm 240.

sinkronisasi dan harmonisasi untuk menyinergikan pelaksanaan agenda dari alat kelengkapan. Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri telah melaksanakannya dengan baik hal ini terbukti dengan kesimpulan dan keputusan yang diambil saat persidangan. Selain itu Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri juga memiliki hubungan yang harmonis dengan alat kelengkapan lain dan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri, ini hal yang baik guna menunjang sinergi antara DPRD dengan Sekretariat DPRD itu sendiri.

2. Komisi

Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh alat kelengkapan DPRD, salah satunya adalah komisi yang dibentuk dengan tujuan mengurus bidang dan atau urusan umum tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Anggota Komisi terdiri dari anggota fraksi yang dipilih untuk menempati posisi tersebut. Masa kerja Komisi paling lama 2 tahun.⁵ Jumlah Komisi dalam DPRD Kabupaten Wonogiri adalah 4 komisi, yaitu Komisi I dengan ruang lingkup tugas pemerintahan secara umum, kepegawaian dan diklat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, diketuai oleh Bapak Bambang Sadriyanto, Komisi II dengan ruang lingkup tugas keuangan, pendapatan, dan aset daerah, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga diketuai oleh Ibu Titik Sugiyarti. Komisi III dengan ruang lingkup tugas meliputi PU dan tata kelola ruang, perumahan rakyat, permukiman, dan pertanahan diketuai oleh Bapak Joko Prayitno. Komisi IV dengan ruang lingkup tugas pendidikan, kesehatan dan sosial ketenagakerjaan diketuai oleh Bapak Sriyono.

3. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah dibentuk oleh pimpinan DPRD yang terdiri dari sebanyak-banyaknya setengah atau 50% dari kursi anggota DPRD yang didasarkan pada hasil proporsi anggota tiap fraksi. Badan Musyawarah (BANMUS) ditetapkan berdasarkan paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Fraksi, dan Badan Anggaran. Badan Musyawarah memiliki tugas antara lain melakukan koordinasi penyusunan Renja tahunan dan 5 tahunan DPRD,

⁵ Bratakusumah, Deddy Supriady, loc. cit

menetapkan rencana kegiatan DPRD untuk 1 tahun, dan memberikan tanggapan dan usulan pada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan;

4. Bapemperda

Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari paling banyak sejumlah anggota fraksi terbanyak.⁶ Bapemperda Kabupaten Wonogiri diketuai oleh Bapak Gimanto dari fraksi PDI perjuangan. Bapemperda ini memiliki tugas antara lain menyusun rancangan program dari pembentukan suatu Perda, mengkaji Peraturan daerah dan atau peraturan lain terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah, menyiapkan dan mengikuti rangkaian dalam proses pembahasan rancangan suatu Perda yang diajukan oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah. Selain itu Bapemperda juga bertugas membuat laporan tentang kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD dan yang terakhir adalah menginventarisasi permasalahan yang muncul pada saat pembentukan Peraturan sebagai bahan acuan atau tolok ukur bagi komisi pada masa berikutnya. Kinerja Bapemperda Kabupaten Wonogiri dinilai sudah baik hal ini dibuktikan dengan adanya Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri..

5. Badan Anggaran

Badan anggaran terdiri dari anggota yang diusulkan oleh tiap-tiap fraksi dengan pertimbangan jumlah sebanyak-banyaknya 50% atau setengah dari jumlah anggota komisi terbanyak.⁷ Badan anggaran bertugas untuk memberikan saran dan pendapat sebagai bahan pertimbangan Bupati terkait dengan pembuatan rancangan APBD, membahas rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan tim Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan, dan memberikan saran dan usulan kepada Pimpinan DPRD pada saat proses perumusan rencana belanja DPRD. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wonogiri telah menjalankan tugasnya dengan baik, ini dibuktikan dengan tercapainya Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian yang didapatkan Kabupaten Wonogiri selama 4 tahun berturut-turut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ;

⁶ Pasal 62 ayat 2 Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri

⁷ Pasal 64 ayat 1 Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri

6. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan yang keanggotaannya berasal dari dan diusulkan oleh anggota DPRD dengan jumlah 5 (lima) orang berdasarkan usulan fraksi. Badan Kehormatan bertugas untuk mengawasi dan menilai kedisiplinan dan ketaatan dari anggota DPRD atas sumpah/janji dan kode etik, melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan atau masyarakat. Tugas ini untuk melindungi moral, kehormatan, dan harkat serta kredibilitas dari DPRD.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wonogiri berhak memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik DPRD Kabupaten Wonogiri, meminta keterangan pelapor, saksi dan pihak lain yang terlibat serta meminta bukti, selain itu Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wonogiri berhak memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. ;

7. PANSUS

Pansus merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat khusus.⁸ Anggota dari pansus terdiri dari anggota yang diajukan dan telah mendapat pandangan dari Badan Musyawarah dan berjumlah sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang. Untuk masa kerja dari Panitia Khusus ini tergantung dari Pimpinan DPRD, di DPRD Kabupaten Wonogiri masa kerja untuk Pansus adalah maksimal 1 tahun untuk tugas pembentukan Peraturan Daerah, dan maksimal 6 bulan untuk tugas lainnya luar pembentukan perda.⁹

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPRD Kabupaten Wonogiri dilengkapi oleh hak – hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki hak¹⁰ :

1. Hak interpelasi
2. Hak angket

⁸ Bratakusumah, Deddy Supriady loc. cit

⁹ Pasal 75 ayat 4 Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri.

¹⁰ Pasal 82 ayat 1 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri

3. Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk memberikan pendapat terkait dengan kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerahnya. Dalam hal memberikan pendapat ini DPRD juga harus memberikan rekomendasi atau saran yang dapat digunakan sebagai penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD setidaknya memuat tentang (a) materi dan alasan pengajuan usulan pendapat, (b) materi dari hasil pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket yang telah dilakukan sebelumnya.

Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

